

Peranan Pemerintah Dalam Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Pasca Pandemi Covid-19

Bagus Dwi Cahyo¹, Ellen Praditha², Fakhri Dani Alfarizi³,
Putri Selviana Anjani⁴, Heni Noviarita⁵

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung¹²³⁴⁵

Jl.Letnan Kolonel H.Endro Suratmin Sukarame Bandar
Lampung(0721)703260

Email: bdcahyo48@gmail.com ellenpraditha4@gmail.com fakhridanii880@gmail.com
putriselvianaa08@gmail.com heninoviarita@radenintan.ac.id

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia berdampak pula pada perekonomian Indonesia. Aspek ekonomi merupakan dampak yang paling mendapat perhatian setelah aspek kesehatan. Perekonomian di Indonesia mengalami penurunan akibat pengaruh dari luar maupun keadaan di daerah sendiri. Krisis ekonomi harus segera diatasi agar tidak terpuruk lebih dalam lagi menjadi depresi ekonomi. Karena itu, pemulihan ekonomi harus segera dirancang dan mulai dilaksanakan. Melalui kajian jurnal ini bertujuan untuk mengungkapkan basis ekonomi di Indonesia untuk melakukan pemulihan perekonomian akibat pandemi Covid-19. Sebagai penguatan program pemulihan, harus ada kebijakan dan fasilitas dari pemerintah untuk menggerakkan dan memperlancar upaya pemulihan, serta harus melibatkan perusahaan besar yang ada di daerah untuk membantu pemberdayaan aspek bisnis pada usaha rakyat. Kajian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi pengembangan Ekonomi kerakyatan (Economic Civic) dan sangat relevan dilakukan mengingat Ekonomi Kerakyatan merupakan usaha-usaha di bidang ekonomi, dimana target pencapaian utamanya bukanlah keuntungan finansial semata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni mengumpulkan data-data dari artikel ilmiah, laporan penelitian atau hal-hal yang relevan dengan topik.

Kata kunci : Peranan Pemerintah, Pemulihan Ekonomi Kerakyatan, Covid-19

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic that has hit the world has also had an impact on the Indonesian economy. The economic aspect is the impact that gets the most attention after the health aspect. The economy in Indonesia has experienced a decline due to external influences and conditions in its own region. The economic crisis must be overcome immediately so that it does not sink deeper into an economic depression. Therefore, economic recovery must be designed and implemented immediately. Through this journal study, it aims to reveal the economic base in Indonesia to carry out economic recovery due to the Covid-19 pandemic. As a strengthening of the recovery program, there must be policies and facilities from the government to mobilize and expedite recovery efforts, and must involve large companies in the region to help empower aspects business to people's business. This research study aims to determine the development strategy. People's economy (Economic Civic) and very relevant to do bearing in mind that People's Economy is efforts in the economic sector, where the main achievement target is not merely financial gain. This study uses a qualitative research method, namely collecting data from scientific articles, research reports or relevant articles topics

Keywords : Role of Government, People's Economic Recovery, Covid-19

A. PENDAHULUAN

Pembatasan aktivitas akibat pandemi Covid-19 telah mempengaruhi aktivitas ekonomi secara nasional. Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Pengaruh ekonomi pada masa covid itu hanya akan tertutupi apabila krisis dapat diakhiri sebelum menimbulkan kebangkrutan usaha secara massal. Namun saat ini sudah ada beberapa kegiatan bisnis yang gulung tikar dan memutuskan kerja ribuan buruhnya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pandemi virus Corona (Covid-19) menjadi pukulan berat bagi perekonomian Indonesia. Tidak hanya itu saja, pandemi juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia melambat. Kondisi Perekonomian masyarakat Indonesia saat ini sedang tidak stabil dikala pemerintah sedang berupaya untuk mengoptimalkan kondisi Perekonomian di Indonesia, pandemi datang dengan segala dampak negatifnya. Seperti yang kita ketahui sekarang bahwa dampak dari pandemi ini sangat berpengaruh terhadap segala aspek terutama pada kondisi kesehatan dan Perekonomian masyarakat.

Dengan adanya pandemi Covid-19 tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian masyarakat Indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi yang bisa dibilang (tidak stabil). Pada masa pandemi banyak sekali dampak negatif yang kita rasakan, banyak para pekerja yang di PHK oleh perusahaannya, banyak juga pekerjaan formal dan informal yang merasakan dampak dari pandemi ini seperti: guru, dokter, karyawan RS, para pedagang, buruh, petani, dan yang lainnya, mereka semua merasakan dampak negatif dari pandemi ini yang menjadikan banyaknya pengangguran, kurangnya pemasukan, bangkrutnya para pengusaha, dan yang lebih prihatinnya ada yang sampai menutup perusahaannya. Saat ini perekonomian global termasuk Indonesia mengalami ketidakpastian dan mengarah pada resesi ekonomi karena pandemi Covid-19. Perlambatan ekonomi pasti akan berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020. Pandemi menimbulkan efek domino dari kesehatan ke masalah sosial dan ekonomi.

Pandemi covid 19 di indonesia terjadi pertama kali pada tanggal 2 maret 2020, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan Jawa Timur, DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan sebagai provinsi palinh terpapar. Upaya pencegahan penyebarannya dilakukan dan dikampanyekan oleh berbagai bidang pemerintah dan tenaga kesehatan. Setidaknya ada dua cara yang menjadi kunci pengendalian penularan dan penyebaran Covid 19 yaitu dengan cara menjaga jarak dan rajin mencuci tangan dengan sabun dan memperbanyak wastafel portable yang diadakan secara mandiri oleh masyarakat. Pemerintahpun akhirnya melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta mengkampanyekan *Stay at home*. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 merupakan payung hukum dalam pelaksanaan sistem ekonomi kerakyatan.

Secara historis konsep ekonomi kerakyatan merupakan gagasan di bidang ekonomi yang dikembangkan oleh Soekarno dan Hatta pada tahun 1930-an. Soekarno menggunakan istilah ekonomi rakyat yang berhadapan dengan sistem ekonomi monopoli. Penelitian Sri Edi Swansono (2014: 89) mengemukakan bahwa pendapat Mohamad Hatta tentang ekonomi kerakyatan menggunakan istilah perekonomian ra'jat dan ekonomi ra'jat merujuk pada pemahaman tentang *gras-*

roostseconomy atau ekonomi berbasis rakyat (*people-based economy*) dan ekonomi terpusat pada kepentingan rakyat (*people-centered economy*). Pembangunan ekonomi di Indonesia landasan pemikirannya terkandung pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Makna secara historis menyatakan bahwa peran negara dalam menjamin segala apa yang terkandung pada bumi Indonesia harus dikuasai negara dan diperuntukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Menurut Sabil (2014: 51) besar kecilnya perekonomian rakyat tergantung pada tingkat pertumbuhan ekonomi atau nominal produk domestik bruto (PDB). Berbagai cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara sebagai modal usaha mencapai kemakmuran rakyat. Untuk mencapai kemakmuran tersebut, hadir pandangan mengenai ekonomi kerakyatan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Hasmawati (2018: 54) menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan adalah kegiatan yang luas kepada masyarakat untuk pelaksanaan dan pengembangan yang baik. Sehingga memenuhi syarat khususnya untuk mewujudkan sila ke 5 (lima), “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat”.

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis memakai jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian dengan mengemukakan dan memanifestasikan. Untuk pengumpulan data Sugiyono berpendapat bahwa penelitian kepustakaan adalah sebuah penelitian yang sifatnya mengkaji secara teoritis, setiap peristiwa yang berkenaan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang. Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini didapatkan dari berita dan artikel pada situs online yang valid, selain itu juga menggunakan jurnal publikasi yang relevan sesuai tujuan penelitian.

Sumber data penelitian merupakan sumber data sekunder, sebab data didapat dari berita, artikel dan jurnal publikasi. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan secara dokumentasi yaitu mengidentifikasi variabel atau peristiwa yang diteliti lewat catatan, buku, makalah, artikel berita, hingga jurnal publikasi.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan deskriptif-analisis, yang menjelaskan dan menggambarkan fokus pada kajian utama penelitian dari konsep-konsep yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi dengan analisis pendapat cendekiawan dan para ahli yang berkompeten dalam kajian tersebut, sehingga paparan yang disajikan menjadi lebih mudah dibaca dan dipahami. Sementara untuk menyajikan kesimpulan dengan menggunakan analisis deduktif, dimana hal-hal yang bersifat umum disimpulkan menjadi kesimpulan khusus.

C. PEMBAHASAN

Akibat pandemi ini, seluruh aspek kehidupan mengalami dampaknya, terutama dalam tiga aspek kehidupan, yaitu kesehatan, pendidikan dan tak terkecuali pada sektor ekonomi yang juga mengalami dampak cukup besar (Arrizal & Sofyantoro, 2020). Seluruh negara mengalami dampak dan kerugian yang hampir sama akibat pandemi ini. Bahkan negara Inggris yang memiliki perekonomian kuat berdampak pada menurunnya PDB mereka sebesar 3,0% akibat pandemi COVID-19 (Caballero-Morales, 2021). Bank dunia menyatakan akibat pandemi COVID-19 menyebabkan perekonomian Indonesia akan mengalami perlambatan laju pertumbuhan. Dampak pandemi Covid-19 tidak hanya itu saja namun juga berdampak pada kesejahteraan ekonomi negara hingga ekonomi masyarakat. Covid-19 melumpuhkan perekonomian negara dan masyarakat, terutama pekerja informal yang rentan berkurang pendapatannya hingga kehilangan mata pencarian lantaran sepi permintaan. Dengan adanya Covid-19 pemerintah mulai 3 menggalakan social distancing, lockdown, serta karantina wilayah. Hal tersebut dilakukan untuk memutus rantai penyebaran Covid 19 agar ekonomi kerakyatan di Indonesia dapat berkembang di tengah pandemi ini.. Aktivitas ekonomi terhenti dengan diberlakukannya pembatasan masyarakat, sehingga jutaan orang kehilangan pekerjaan dan meningkatkan kemiskinan.

1. Pengertian Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan dapat ditafsirkan sebagai setara dengan istilah demokrasi ekonomi yang secara tegas terdapat pasal penjelasan. Penjelasan pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan yakni sistem ekonomi dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, serta dibawah pemilikan anggota-anggota masyarakat. Dengan demikian salah satu pilar dari demokrasi ekonomi itu adalah keikutsertaan semua orang dalam kegiatan produksi. Pemahaman tentang ekonomi rakyat dapat dipandang dari dua pendekatan yaitu: pertama, pendekatan kegiatan ekonomi dari pelaku ekonomi berskala kecil, yang disebut perekonomian rakyat.

Berdasarkan pendekatan ini, pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan adalah pemberdayaan pelaku ekonomi skala kecil. Kedua, pendekatan sistem ekonomi, yaitu demokrasi ekonomi atau sistem pembangunan yang demokratis, disebut pembangunan partisipatif (*participatory development*). Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi kerakyatan adalah perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkaitan erat dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, keberpihakan pada ekonomi rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan atau mayoritas masyarakat.

2. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Ekonomi Kerakyatan

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020 hingga sekarang membawa dampak yang signifikan bagi negara. Hampir seluruh negara di dunia terdampak akibat pandemi Covid-19 ini. Segala upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 telah dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah.

Penerapan pembatasan sosial (social distancing) ataupun physical distancing adalah upaya yang ditempuh oleh pemerintah. Meski berdampak baik namun upaya ini belum menunjukkan langkah pencegahan virus secara sempurna. Langkah terbesar yang kini mulai diberlakukan oleh beberapa daerah yang termasuk dalam kategori zona merah pandemi untuk mencegah penyebaran virus adalah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Langkah ini dinilai akan mencegah penyebaran virus dalam skala besar.

PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Langkah besar juga telah diputuskan oleh pemerintah pusat dalam mencegah penyebaran virus yaitu dengan memberhentikan sementara waktu akses transportasi di seluruh wilayah Indonesia. Pembahasan mengenai penanganan pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi digelar via teleconference oleh Institutes for Development of Economics and Finance (INDEF). Hasil dari pembahasan tersebut bahwa setiap hari pandemi ini semakin berdampak ke dalam perekonomian Indonesia secara umum. Dampak ekonomi akibat pandemi semula hanya menggerus sisi 10 eksternal. Namun seiring semakin meningkatnya kasus penyebaran Covid-19 turut berimbas pada stabilitas perekonomian internal. Hakekat pertumbuhan ekonomi adalah kesejahteraan rakyat. Hal ini berarti menekankan perlunya pertumbuhan ekonomi untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak ada artinya keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang tidak menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Untuk itu, perlu diciptakan kondisi perekonomian yang terus tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi dan stabilitas ekonomi tetap dapat terjaga. Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata dapat ditunjukkan antara lain melalui peningkatan pendapatan perkapita beberapa kali lipat, menurunnya secara drastis jumlah penduduk miskin dan tersedianya lapangan kerja yang memadai bagi rakyat.

Dampak negatif yang paling cepat dirasakan sebagai akibat dari krisis perekonomian adalah pada sektor keuangan melalui aspek sentimen psikologis

dan akibat merosotnya likuiditas . Perlambatan pertumbuhan ekonomi, juga akan berdampak pada banyaknya industri besar yang terancam bangkrut, terjadinya penurunan kapasitas produksi dan terjadinya lonjakan jumlah pengangguran. Bagi negara-negara berkembang dan emerging markets, situasi ini dapat merusak fundamental perekonomian dan memicu terjadinya krisis ekonomi. Kekhawatiran atas dampak negatif pelemahan ekonomi terhadap perekonomian di negara-negara emerging markets dan fenomena flight to quality dari investor global di tengah krisis keuangan dunia dewasa ini, telah memberikan tekanan pada mata uang seluruh dunia, termasuk Indonesia dan mengeringkan likuiditas dolar Amerika Serikat di pasar domestik di banyak negara. Hal ini menyebabkan pasar valas di negara maju dan berkembang cenderung bergejolak di tengah ketidakpastian yang meningkat.. Permasalahan ini tentu berpengaruh pada arus permintaan (demand), penawaran (supply), dan investasi.

3. Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Setelah Covid-19

Ada beberapa langkah atau upaya yang harus diperhatikan dalam merealisasikan atau mengembangkan ekonomi kerakyatan di tengah pandemi Covid-19 yaitu:

1. Perlu dilakukannya identifikasi mengenai potensi dan pengembangan usaha terhadap pelaku ekonomi, seperti koperasi, usaha kecil, mikro, menengah, petani dan kelompok tani.
2. Melakukan program pembinaan terhadap pelaku-pelaku usaha melalui program pendamping.
3. Program pendidikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat mengembangkan usaha.
4. Koordinasi dan evaluasi kepada yang terlibat dalam proses pembinaan, baik pembinaan terhadap permodalan, SDM, pasar, informasi pasar, maupun penerapan teknologi.

Sedangkan, agenda sistem ekonomi kerakyatan di tengah pandemi Covid-19 yang lainnya yang dapat diterapkan adalah:

1. Sumber daya ekonomi yang semakin dikembangkan aksesnya. Pelaku ekonomi rakyat tentunya harus bisa mengakses sumber daya ekonomi seperti modal, bahan baku, dan informasi. Mekanisme pemberian kredit dan penerapan bunga harus memastikan untuk tidak mendiskriminasi pelaku ekonomi rakyat. Pelaksanaan UU 6/2014 tentang desa dengan menyediakan cash transfer kepada desa merupakan wujud konkrit pengembangan akses masyarakat desa kepada sumber daya ekonomi, dalam hal ini finansial. Program pemerintah untuk membangun infrastruktur pada daerah terdepan, terisolir, dan terbelakang juga merupakan bentuk lain dari akses kepada sumber daya ekonomi seperti pasar.
2. Perlunya penataan kelembagaan.
Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penataan kelembagaan untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan adalah:
 - a. Pemberian izin usaha yang diperlukan pelaku ekonomi rakyat perlu diberikan dengan cepat, mudah, dan murah. Meskipun saat ini pemerintah gencar untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perijinan, namun kebijakan ini masih menjadikan investor dari luar sebagai prioritas. Pelaku ekonomi rakyat masih berada di pinggiran. Perijinan yang seharusnya merupakan pengungkit bagi pengembangan usaha rakyat dalam praktik masih menjadi beban.
 - b. Memastikan agar pelaku ekonomi besar/global tidak memasuki sektor-sektor ekonomi yang menjadi bidang gerak ekonomi rakyat. Sepuluh paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah berfokus untuk mendatangkan investor dari luar. Kebijakan tersebut belum diimbangi dengan upaya melindungi dan memberdayakan pelaku usaha ekonomi rakyat.
 - c. Kolaborasi dan pola kerja sama antar pelaku ekonomi rakyat dengan pelaku ekonomi besar/global perlu menjadi praktik bisnis dominan di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah memiliki sarana dengan

menjadikan semua BUMN/BUMD sebagai promotor kerja sama dengan pelaku ekonomi rakyat.

3. Peninjauan kembali (reorientasi) mengenai pendidikan.

Peninjauan kembali mengenai pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan kejuruan yang sesuai kebutuhan menjadi prioritas pengembangan khususnya pada daerah-daerah dengan sumber daya tertentu. Sebagai contoh, daerah dengan potensi sumber daya perikanan perlu dikembangkan pendidikan kejuruan kelautan dan perikanan, sementara daerah dengan potensi hutan perlu mengembangkan pendidikan kejuruan industri kayu dan pengolahan hasil hutan non kayu (*non timber forest product*). Pada sisi lain, pendidikan umum khususnya pada disiplin ekonomi dan manajemen perlu mengembangkan pemahaman dan konsep ekonomi rakyat. Untuk itu studi, pemodelan dan teoritisasi ekonomi rakyat perlu dilakukan oleh para akademisi.

4. Perlunya pengembangan kapasitas.

Mampu bersaingnya pelaku ekonomi rakyat dengan pelaku ekonomi global di era sekarang ini. Pengembangan kapasitas sehingga dapat melaksanakan kegiatan ekonomi yang efisien dan produktif menjadi suatu keharusan. Hal ini bukan persoalan mudah, sebagai contoh pengembangan kapasitas dari aparat desa untuk mampu memanfaatkan dana desa secara optimal masih menjadi tantangan. Terdapat lebih dari 74,000 desa, bila setiap desa harus dilatih kepala desa, sekretaris desa, dan kepala BPD (Badan Perwakilan Desa) berarti 222,000 orang perlu mendapatkan pelatihan. Koordinasi antar lembaga pemerintah untuk melaksanakan hal ini masih menjadi isu yang tidak kunjung selesai.

5. Mengatasi hambatan ekonomi.

Dalam hal ini perlu diatasinya hambatan ekonomi kerakyatan. Hambatan ekonomi kerakyatan terdiri dari praktik bisnis besar yang ilegal seperti ilegal fishing, ilegal logging, ilegal trading. Praktik bisnis ilegal membuat pelaku usaha besar mendapatkan bahan baku yang murah dan pada kasus perikanan menyebabkan nelayan kecil kehilangan lapangan pekerjaan.

Hambatan ekonomi berikutnya adalah tata niaga yang bias sehingga menyebabkan harga jual pelaku ekonomi rakyat senantiasa tertekan, seperti komoditi pertanian dan perkebunan. Hambatan ekonomi terakhir adalah berbagai pungutan dan retribusi yang dibebankan oleh otoritas lokal, seringkali tanpa ada dasar yang jelas.

KESIMPULAN

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020 hingga sekarang membawa dampak yang signifikan bagi negara.. Saat ini perekonomian global termasuk Indonesia mengalami ketidakpastian dan mengarah pada resesi ekonomi karena pandemi Covid-19. Perlambatan ekonomi pasti akan berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020. Pandemi menimbulkan efek domino dari kesehatan ke masalah sosial dan ekonomi. Hampir seluruh negara di dunia terdampak akibat pandemi Covid-19 ini. Salah satu negara yang terkena dampaknya adalah negara kita Indonesia. Dampak pandemi Covid-19 tidak hanya pada kesehatan masyarakat namun juga berdampak pada ekonomi kerakyatan atau kesejahteraan ekonomi negara hingga ekonomi masyarakat.

Pandemi Covid-19 berimbas kepada sektor ekonomi baik negara, perusahaan hingga masyarakat tentu sangat membutuhkan nilai-nilai ekonomi kerakyatan Secara historis konsep ekonomi kerakyatan merupakan gagasan di bidang ekonomi yang dikembangkan oleh Soekarno dan Hatta pada tahun 1930-an. Dalam menangani permasalahan ekonomi kerakyatan ini tentu di butuhkan peran dari pemerintah Indonesia, Ada beberapa langkah atau upaya yang harus diperhatikan dalam merealisasikan atau mengembangkan ekonomi kerakyatan di tengah pandemi Covid-19 yaitu perlu dilakukannya identifikasi mengenai potensi dan pengembangan usaha terhadap pelaku ekonomi, seperti koperasi, usaha kecil, mikro, menengah, petani dan kelompok tani. Melakukan program pembinaan terhadap pelaku-pelaku usaha melalui program pendamping. Program pendidikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat mengembangkan usaha dan Koordinasi dan evaluasi kepada yang terlibat

dalam proses pembinaan, baik pembinaan terhadap permodalan, SDM, pasar, informasi pasar, maupun penerapan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Arahmad Yasin Zamzami, *Ekonomi Indonesia Di Kala Pandemi Covid 19*, (
<https://retizen.republika.co.id/posts/24421/ekonomi-indonesia-di-kala-pandemi-covid-19>)

M. Ali Nasrun.2020. *Kekuatan Dasar Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 di Kabupaten Kapuas Hulu*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia. Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan .ISBN: 978-602-53460-5-7

Muhamad Hijran, Dini Oktariani, (2021), *PERAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM PENGEMBANGAN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN SAAT PANDEMI COVID-19 MENURUT UNDANG-UNDANG 1945*, jurnal profit : Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi, volume 8 (2), 2021. Universitas Bangka Belitung.

Nainggolan, Edward UP. 2020. Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13287/Strategi-Kebijakan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional.html>)

Novia Turmina Umi, rahma Apriani, Maya Puspita Sari, Ratriana Pundarika, Heni Noviarita, (2022), *DAMPAK KRISIS EKONOMI TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN DI INDONESIA DALAM PANDANGAN ISLAM*, Islamic Economics Journal Volume 3, N0 2 (2022) Universitas Raden Intan Lampung.

Supardi. 2005.*Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.

Tri Utami, *PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN DI INDONESIA ERA PANDEMI COVID-19*, Universitas Negeri Yagyakarta

Wilfarda Charismanur Anggraeni, Wulan Puspita Ningtiyas, Nurdiyah Mufidatul Alimah. . *Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. (2020)*Journal of Government and Politics (JGOP) ISSN:2686-3391 Vol. 3 No. 1

Zulkipli, Muharir.2021.*DAMPAK COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA. STEBIS IGM Palembang.*JIMESHA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 1